

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus mengeluarkan laporan tahunan yang berisikan laporan keuangan perusahaan di mana laporan tersebut mempunyai tujuan untuk memberikan informasi bagi para pengguna informasi atas laporan keuangan tersebut. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Emiten atau Perusahaan Publik dijelaskan dalam salah satu peraturan tersebut bahwa perusahaan harus mengeluarkan laporan keuangan yang telah di audit. Laporan keuangan tersebut diwajibkan menuliskan tentang laporan auditnya. Ikatan Akuntan IAI (IAI, 2009) pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor satu menjelaskan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan harus benar-benar mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya agar laporan keuangan perusahaan tersebut mempunyai hasil yang *reliable* dan *relevan*, sehingga saat di keluarkan laporan keuangan tersebut tidak menimbulkan salah persepsi dan salah saji.

Untuk mengurangi salah persepsi dan salah saji tersebut, maka perlu dilakukannya audit pada laporan keuangan perusahaan. Auditor mempunyai kekuatan untuk melakukan audit dengan profesional karena pekerjaan audit mengandung tanggung jawab yang sangat besar, yaitu melaksanakan audit

dan memberikan opini audit pada laporan keuangan perusahaan yang di auditnya, sehingga dengan adanya hal tersebut, maka laporan keuangan diharapkan dapat meyakinkan para pengguna laporan keuangan.

Adanya audit dalam suatu laporan keuangan, perusahaan harus mengeluarkan biaya yang sering disebut dengan *audit fee*. Menurut Emmanuel (2014), *audit fee* ini ditentukan berdasarkan negosiasi antara perusahaan yang akan di audit dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) di mana auditor tersebut bekerja. Dalam pernyataan Institute Akuntansi Publik Indonesia (IAPI) pada Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 pada tanggal 2 Juli 2008 tentang kebijakan *audit fee* mengatakan bahwa panduan tersebut adalah panduan untuk menjalankan pelaksanaan sebagai akuntan publik pada saat menetapkan imbalan atau *fee* yang wajar atas jasa audit yang telah dilakukan. Surat keputusan tersebut juga menjelaskan bahwa dalam penetapan *audit fee* harus wajar sesuai dengan posisi profesi akuntan publik dan jumlah *fee* dapat sejajar dengan standar profesional akuntan publik yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, pemberian *audit fee* terdapat dilematis pada auditor karena auditor adalah suatu pekerjaan yang harus menjunjung tinggi independensinya dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan dan memberikan opini auditnya, sedangkan di sisi lain auditor juga mendapatkan imbalan atau *fee* dari perusahaan yang di audit.

Jika membahas tentang *audit fee*, hal tersebut tidak akan ada habisnya karena masih banyak pro dan kontra tentang penentuan *audit fee*. Walaupun

banyak penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *audit fee*, yang masih menjadi perhatian adalah tentang *corporate governance* perusahaan yang diaudit (Wu Xingze, 2012). *Corporate Governance* adalah suatu kegiatan mengendalikan dan mengarahkan perusahaan demi tercapainya tanggung jawab oleh perusahaan kepada *shareholder* dan juga *stakeholdernya* (Hazmi, 2013). *Corporate Governance* terdiri dari dewan komisaris dan komite audit. Manajemen perusahaan saat membuat laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh keberadaan dewan komisaris, sehingga dewan komisaris secara tidak langsung akan memengaruhi kandungan laba laporan keuangan perusahaan. Komisaris independen mempunyai peran penting dalam *audit fee* karena keberadaannya tidak terikat dengan pihak manajemen dan tidak memiliki kepentingan *financial* sehingga keberadaan komisaris independen ini dapat mengurangi sifat manajemen yang oportunistik sehingga untuk menghindari hal tersebut, komisaris independen meminta tolong kepada audit eksternal untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan sebagai tanggung jawab kepada *shareholder*, sehingga hal ini dapat mempengaruhi *audit fee* eksternal.

Rizqiasih (2010) mengatakan, walaupun *corporate governance* dilakukan oleh direksi dan dewan komisaris, komite audit juga mempunyai peran sebagai pengawas independen atas kegiatan *corporate governance*.

Bukan hanya itu, komite audit juga mempunyai tugas untuk mengelola dan mengontrol manajemen risiko dan mengontrol perusahaan.

Selain dilihat dari segi *corporate governance*, kinerja keuangan perusahaan juga dapat mempengaruhi *audit fee*. Kinerja keuangan perusahaan adalah suatu cerminan tentang kondisi keuangan pada suatu perusahaan yang dapat dianalisis menggunakan alat-alat analisis keuangan, sehingga dalam analisis tersebut kita dapat mengetahui baik atau buruk keuangan suatu perusahaan. Hal tersebut akan mencerminkan prestasi perusahaan pada suatu periode tertentu. Kinerja keuangan ini terdiri dari ukuran perusahaan, *leverage* dan *profitabilitas* perusahaan yang di audit (Hazmi, 2013). Kinerja keuangan perusahaan adalah salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya pada pengguna informasi laporan keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini, semakin besar kinerja keuangan maka dianggap semakin kompleks auditnya sehingga hal tersebut akan mempengaruhi pihak audit dalam menentukan *audit feenya*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Yusuf (2016), penelitian tersebut membandingkan *audit fee* antara Indonesia dan Malaysia yang menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen dan ukuran komite audit tidak mempengaruhi *audit fee* di Indonesia dan Malaysia dan ukuran dewan

komisaris berpengaruh positif terhadap *audit fee* di Indonesia dan berpengaruh negatif terhadap *audit fee* di Malaysia.

Alasan pemilihan Negara Indonesia dan Singapura adalah mengingat bahwa Negara Indonesia adalah negara berkembang dan Singapura adalah negara maju namun kedua negara tersebut masuk pada organisasi yang sama, yaitu sama-sama tergabung dalam anggota anggota *APEC* (*Asian Pasific Economic Cooperation*) di mana hal-hal tersebut membuat Indonesia dan Singapura mempunyai integrasi yang kuat karena sama-sama berada dalam organisasi yang sama untuk mengembangkan ekonomi dan politik antara Indonesia dan Singapura dan negara-negara yang termasuk dalam *APEC*. Selain itu, Indonesia dan Singapura juga sama-sama tergabung dalam *AEC* (*Asean Economic Community*). Dalam organisasi-organisasi ekonomi tersebut, maka laporan keuangan yang berkompeten sangat dibutuhkan dan salah satu langkah untuk mendapatkan laporan keuangan yang baik adalah melakukan audit pada laporan keuangan tersebut. Hal ini tentu akan mempengaruhi perkembangan ekonomi antar kedua negara dan akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah investasi yang terbuka lebar dan hal tersebut akan timbul semakin dibutuhkannya standarisasi audit yang sama untuk negara yang berada di wilayah ASEAN.

Pada penelitian ini, menambahkan variabel kinerja keuangan perusahaan dan dalam variabel tersebut dihitung menggunakan 3 variabel,

yaitu ukuran perusahaan, *leverage* dan *profitabilitas*. Penelitian Hazmi (2013) mengatakan bahwa ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *audit fee* dan *profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap *audit fee*. Namun, pada variabel *leverage* pada penelitian Riaqiasih (2012) mendapatkan hasil yang positif antara *leverage* terhadap *audit fee*.

Penelitian komparatif antara Indonesia dan Singapura mengenai *audit fee* ini belum pernah dilakukan. Namun penulis menggunakan acuan penelitian tentang *audit fee* komparatif antara Indonesia dan Malaysia yang dilakukan oleh Yusuf (2016) dan penelitian komparatif Malaysia dan Singapura yang dilakukan oleh Poitras *et al* (1995) sebagai acuan penelitian ini. Penelitian yang akan saya teliti akan mengacu dan mengadopsi penelitian-penelitian terdahulu di mana metode tersebut disesuaikan dengan variabel yang akan di teliti.

Merujuk pada penelitian sebelumnya dengan mengembangkan penelitian terdahulu milik Yusuf (2016), Hazmi (2013), Emmanuel (2014), Puspitasari dan Latrini (2014), serta Poitras *et al* (1995) maka dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menggabungkan permasalahan tentang penentuan *audit fee* serta membandingkan pengaruh antar variabel di Negara Indonesia dan Singapura. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Komparatif Pengaruh Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Perusahaan terhadap Audit Fee** (Studi Empiris pada Perusahaan

Manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia dan *Singapore Exchange* tahun 2014-2016).

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah dalam *struktur corporate governance* menggunakan variabel proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit. Pada kinerja keuangan perusahaan menggunakan variabel ukuran perusahaan, *leverage* dan *profitabilitas* perusahaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *audit fee* di Indonesia dan Singapura?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *audit fee* di Indonesia dan Singapura?
3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit fee* di Indonesia dan Singapura?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit fee* di Indonesia dan Singapura?
5. Apakah rasio *leverage* berpengaruh positif terhadap *audit fee* di Indonesia dan Singapura?

6. Apakah *profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap *audit fee* di Indonesia dan Singapura?
7. Apakah ada perbedaan pengaruh struktur *corporate governance* dan kinerja keuangan pada penetapan *audit fee* di Indonesia dan Singapura?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan mengetahui secara empiris pengaruh proporsi komisaris independen terhadap *audit fee* di Indonesia dan Singapura.
2. Untuk menguji dan mengetahui secara empiris pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *audit fee* di Indonesia dan Singapura.
3. Untuk menguji dan mengetahui secara empiris pengaruh ukuran komite audit terhadap *audit fee* di Indonesia dan Singapura.
4. Untuk menguji dan mengetahui secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit fee* di Indonesia dan Singapura.
5. Untuk menguji dan mengetahui secara empiris pengaruh *leverage* terhadap *audit fee* di Indonesia dan Singapura.
6. Untuk menguji dan mengetahui secara empiris pengaruh *profitabilitas* terhadap *audit fee* di Indonesia dan Singapura.
7. Untuk menguji dan mengetahui secara empiris perbedaan pengaruh struktur *corporate governance* dan kinerja keuangan pada penetapan *audit fee* di Indonesia dan Singapura.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat di bidang teoritis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam perkembangan akuntansi terlebih dalam permasalahan *audit fee*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya terlebih dalam penelitian komparatif yaitu perbandingan *audit fee* di Indonesia dan Singapura.

2. Manfaat di bidang praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk membuat regulasi untuk *audit fee* karena mengingat belum ada peraturan khusus untuk *audit fee* dan *audit fee* masih bersifat sukarela.

b. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi investor dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi di perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia maupun *Singapore Exchange*.